



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: www.pta-padang.go.id Email: admin@pta-padang.go.id

PADANG

Nomor : W3-A/ 1555/PL.07/VIII/2019

Padang, 19 Agustus 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pendataan Aset berupa Kendaraan Dinas**

Kepada Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang
2. Sekretaris Pengadilan Negeri se Sumatera Barat
3. Sekretaris Pengadilan Agama se Sumatera Barat
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
5. Sekretaris Pengadilan Militer I-03

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 362/BUA.4/PL.07/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Satuan kerja melakukan update data BMN berupa kendaraan dinas pada aplikasi SIMAK BMN, yaitu dengan:
 - a. Memastikan kondisi pada pencatatan sesuai dengan kondisi fisik aset yang sebenarnya;
 - b. Melengkapi KIB kendaraan dinas;
 - c. Memastikan bukti kepemilikan ada dan sesuai dengan setiap kendaraan dinas;
 - d. Mengisi formulir pendataan aset sesuai dengan format sebagaimana terlampir dengan mengunduh softcopynya pada [http://bit.ly/form kendaraan ma](http://bit.ly/form_kendaraan_ma);
2. Formulir kendaraan dinas yang sudah diisi disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui email simak@pta-padang.go.id dalam bentuk softcopy excel dan pdf (yang sudah ditandatangani) beserta foto kendaraan dinas yang terbaru paling lambat tanggal 20 Agustus 2019;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Wassalam,
Sekretaris
Selaku Penanggung Jawab
Koordinator Wilayah Sumatera Barat



Irsyadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 195704131984031001

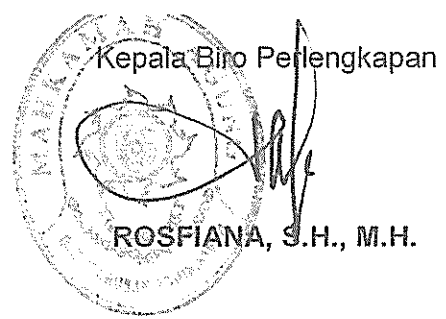
Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai laporan

- Yth. 1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau
- di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertibnya penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas dan dalam rangka pembaruan dan sinkronisasi data pada aplikasi SIMAKBMN, SIMAN dan SIPERMARI, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Satuan kerja Eselon 1 pusat dan satuan kerja daerah untuk melakukan update data BMN berupa kendaraan dinas pada aplikasi SIMAKBMN, yaitu:
 - a. Memastikan kondisi pada pencatatan sesuai dengan kondisi fisik aset sebenarnya;
 - b. Melengkapi KIB kendaraan dinas;
 - c. Memastikan bukti kepemilikan ada dan sesuai dengan setiap kendaraan dinas.
 - d. Mengisi formulir pendataan aset sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada surat ini dengan mengunduh *softcopynya* pada http://bit.ly/form_kendaraan_ma;
2. Formulir kendaraan dinas yang sudah diisi data aset kendaraan dinas untuk disampaikan dalam bentuk *softcopy (excel)* beserta foto kendaraan dinas yang terbaru paling lambat tanggal 20 Agustus 2019, yaitu:
 - a. Untuk satuan kerja Eselon 1 pusat langsung menyampaikan kepada Biro Perlengkapan;
 - b. Untuk satuan kerja daerah menyampaikan kepada Koordinator Wilayah masing-masing;
3. Koordinator Wilayah untuk melakukan kompilasi formulir pendataan kendaraan dinas seluruh satuan kerja di wilayahnya dan menyampaikan hasil rekapitulasinya dalam bentuk *softcopy* kepada Biro Perlengkapan paling lambat tanggal 22 Agustus 2019;
4. Koordinator Wilayah meneruskan surat ini kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya masing-masing;



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;